

Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jams

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, AKUNTABILITAS DEWAN, DAN TRANSPARANSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KOMITE CSR SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2023)

Silvia Kusumaningrum¹ Komala Ardiyani² Dina Amalia³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan

silviakususmaningarum2@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 29 July 2025

*Received in revised form: 23
August 2025*

Accepted: 29 May 2026

Keywords: *Tax Planning, Board
Accountability, Transparency,
Corporate Value, CSR Committee*

ABSTRACT

This study aims to analyze and test the effect of Tax Planning, Board Accountability, and Transparency on Firm Value with the CSR Committee as a Moderating Variable. This type of research is quantitative research with a causal approach. The population in this study are industrial sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. The research sample obtained by purposive sampling method amounted to 38 companies, resulting in 190 samples and 6 outliers, resulting in a total of 184 samples. The type of data used is secondary data. The data analysis technique used in this study is Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the help of Warp-PLS software version 7.0. The results of this study found that tax planning has a positive effect on firm value. While board accountability and transparency do not affect firm value. In addition, tax planning can moderate (weaken) the influence of the CSR committee on firm value. However, board accountability and transparency cannot moderate the influence of the CSR committee on firm value.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat membuat perusahaan terus berupaya untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan daya saingnya. Hal ini menunjukkan agar tujuan yang dicapai saat perusahaan didirikan terwujud. Pada umumnya perusahaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek adalah memaksimalkan laba yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas, sedangkan tujuan jangka panjang adalah memaksimalkan nilai perusahaan sendiri. Semakin tinggi harga saham di pasar, nilai perusahaan akan semakin meningkat. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan tingginya kemakmuran para pemegang saham sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi.

Indonesia merupakan negara investor dalam skala global di sektor industri. Kebijakan strategis pemerintah yang memberikan kemudahan izin dan fasilitas insentif dapat mendukung peningkatan realisasi investasi. Pada tahun 2014-2023, realisasi investasi pengolahan nonmigas cenderung mengalami peningkatan. Investasi pengolahan nonmigas terhitung dalam satu dekade mengalami lonjakan yang tajam, yaitu pada tahun 2014 sebesar 186,79 triliun sedangkan pada tahun 2023 sebesar 565,25 triliun. Sehingga dalam kurun waktu 10 tahun realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 3.031,85 triliun. Nilai investasi di sektor industri manufaktur juga mengalami peningkatan yang signifikan, dibuktikan pada tahun 2019 sebesar 213,44 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 259,28 triliun di tahun 2020, sebesar 307,58 triliun tahun 2022, hingga melonjak pada tahun 2023 sebesar 457,60 triliun. Peningkatan investasi di sektor industri manufaktur memiliki korelasi dengan kebijakan pemerintah dalam memacu hilirisasi SDA, khususnya sektor pertambangan. Realisasi investasi didorong dengan prospek pembangunan industri hilirnya sehingga dapat memperdalam struktur manufaktur. Pemerintah bertakad mendukung hilirisasi industri yang berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak eksplor, royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen. Peningkatan realisasi investasi di sektor industri memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional, termasuk dalam penambahan jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur sebanyak 15,62 juta orang dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebanyak 19,29 juta orang (Setkab Agung, 2024).

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu kategori sektor industri di Bursa efek Indonesia (BEI) yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Naik turunnya harga saham di pasar modal menjadi fenomena yang menarik karena berkaitan dengan isu naik turunnya nilai perusahaan itu sendiri termasuk pada perusahaan manufaktur khususnya di sektor industri yang terdaftar di BEI. Pada tahun 2017, pendapatan perusahaan manufaktur naik sebesar 6,3% dari tahun ke tahun sehingga pelemahan daya beli terutama pada komponen makanan, minuman dan tembakau. Pada awal 2018, penjualannya hanya tumbuh sebesar 2% dari tahun ke tahun sehingga banyak pelaku pasar melakukan aksi jual terhadap saham-saham sektor barang konsumsi, utamanya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman, serta tembakau. Hal ini berdampak pada turunnya harga saham seperti pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) turun 0,83%, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) turun 0,68% dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) turun 2,2%. Pada tahun 2019, produsen kertas PT Fajar Surya Wisesa Tbk dengan merk Fajar Paper ini mencatatkan penurunan pendapatan 16,8% dari tahun ke tahun menjadi Rp 8,27 triliun, dari sebelumnya Rp 9,94 triliun. Bahkan, laba bersih PT Fajar Surya Wisesa Tbk turun lebih dalam, yakni 31,06% dari tahun ke tahun menjadi Rp 968,83 miliar. Pada tahun 2020, harga saham perusahaan manufaktur mengalami penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) merosot 31,25% contohnya yaitu PT Arwana Citramulia Tbk, perusahaan yang bergerak dibidang industri keramik, kaca, dan porselin (Diana & FX. Pudjo, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa salah satu perusahaan industri mengalami penurunan saham, dimana harga saham sering dikaitkan dengan nilai perusahaan. Investor memperhatikan berapa besar modal yang dibiayai oleh mereka kepada perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Harga saham menjadi titik tolak ukur dari nilai perusahaan yang artinya semakin tinggi harga saham maka semakin baik nilai perusahaan tersebut. penelitian terdahulu menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan seperti

perencanaan pajak, akuntabilitas, transparansi, dan komite CSR namun terdapat hasil yang berbeda pada penelitian sebelumnya.

Nilai perusahaan adalah pandangan investor terhadap perusahaan, yang dikaitkan dengan harga saham, karena harga saham mencerminkan penilaian investor terhadap prospek perusahaan di masa depan (Menge & Nuringsih, 2021). Tingginya harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran investor semakin tinggi, sedangkan rendahnya harga saham akan berdampak pada nilai perusahaan sehingga anggapan investor terhadap perusahaan kurang baik.

Perencanaan pajak ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai perusahaan. Astuti & Herawati, (2022) mengartikan bahwa perencanaan pajak sebuah Langkah awal yang berkaitan dengan pengendalian transaksi pajak untuk efisiensi pembayaran pajak kepada pemerintah. Hal ini merupakan tahap awal dalam manajemen pajak untuk mengidentifikasi penghematan pajak dengan memahami peraturan yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak untuk mengatur agar beban pajak menjadi sekecil mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku. Penelitian perencanaan terhadap nilai perusahaan membuktikan hasil yang tidak konsisten.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab individu atau kelompok yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas oleh pihak yang memberikan amanat, baik secara vertikal atau horizontal Melasari *et al.*, (2023). Adanya akuntabilitas dapat memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja perusahaan dapat dinilai baik. Transparansi merupakan pengungkapan informasi secara terbuka, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menyampaikan informasi yang penting dan relevan dalam perusahaan.

Komite CSR merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengelola kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Keberadaan komite CSR pada perusahaan tergantung pada faktor kelembagaan dan makro di tingkat negara, karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi struktur dewan perusahaan. Khan *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa komite CSR membantu perusahaan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan mereka, mempromosikan sistem dan kebijakan manajemen yang berkelanjutan. Komite CSR bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyelaraskan tujuan perusahaan dan mencapai komunikasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal (Kuzey *et al.*, 2021). Untuk menghasilkan reputasi perusahaan yang lebih baik, maka perusahaan diperlukan untuk menerapkan komite CSR.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh perencanaan pajak, akuntabilitas, dan transparansi terhadap nilai perusahaan. yang perlu dijelaskan. Hasil yang tidak konsisten tersebut menunculkan dugaan bahwa terdapat faktor lain yang dapat memoderasi hubungan perencanaan pajak, akuntabilitas, dan transparansi terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini akan mencoba meneliti pengaruh komite CSR sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak, akuntabilitas dewan, dan transparansi terhadap nilai perusahaan dengan komite CSR sebagai variabel moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *agency theory*. Teori keagenan merupakan hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dalam mengelola perusahaan (Michael C. Jensen, 1976). Berdasarkan teori keagenan hubungan agensi muncul ketika principal berkerja sama dengan agent (manajemen) untuk memberikan jasanya dengan memberikan wewenang kepada agent

untuk mengambil keputusan. Konflik akan muncul karena perbedaan informasi antara principal dan agent, dimana agent mempunyai informasi lebih banyak tentang organisasi daripada principal sehingga menimbulkan asimetri informasi (Nuansari & Ratri, 2022).

Menurut Astuti & Herawati, (2022) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang bertujuan untuk menentukan cara menghemat pajak dengan memahami peraturan pajak yang berlaku. Dalam teori agensi, perencanaan pajak yang tepat berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Namun demikian, teori agensi juga mengingatkan bahwa strategi perencanaan pajak bisa menimbulkan asimetri informasi, karena manajemen memiliki lebih banyak informasi terkait praktik keuangan perusahaan dibandingkan pemilik. Jika tidak dilakukan dengan transparan, perencanaan pajak yang agresif justru dapat meningkatkan risiko audit atau sanksi pajak yang merugikan perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan yang dilakukan secara legal dan etis mencerminkan peran agen (manajemen) dalam menjaga kepentingan prinsipal (pemegang saham), yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Akuntabilitas dewan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya akuntabilitas ini, diharapkan dapat mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan, serta transparansi dan kinerja perusahaan dapat terus ditingkatkan melalui pengawasan efektifitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik (Linuih & Parasetya, 2024). Berdasarkan teori agensi nilai perusahaan dapat menurun akibat adanya konflik antara manajer dan pemegang saham. Adanya dewan komisaris berperan dalam mengurangi permasalahan yang timbul antara principal dan agen.

Menurut Puspita *et al.*, (2023), transparansi merupakan ketersediaan informasi yang komprehensif, dan dapat diandalkan mengenai kinerja perusahaan, situasi finansial, peluang investasi, pemerintah, serta nilai dan risiko perusahaan secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu. Teori keagenan membahas hubungan principal dan agent. Dalam konteks ini peningkatan transparansi perusahaan dengan memberikan pengungkapan sukarela secara teratur dapat mengurangi perbedaan informasi antara stakeholder, menghentikan manajer (principal) melakukan tindakan demi kepentingan pribadi dapat meningkatkan nilai perusahaan (Nurfauziah, 2021).

Komite CSR adalah suatu komite dalam struktur tata kelola perusahaan yang bertugas untuk merancang, mengawasi, dan mengevaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan. Komite ini memastikan bahwa kebijakan dan aktivitas perusahaan selaras dengan prinsip keberlanjutan, etika, dan kepentingan para pemangku kepentingan (Khan *et al.*, 2024). Keberadaan komite CSR menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam menjaga reputasi dan integritas perusahaan.

DATA DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, menekan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode

purposive sampling, yaitu metode yang diambil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi pemerintah, website, buku, jurnal, artikel, catatan internal dan sebagainya (Nelzi & Fati, 2022). Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 yang diakses melalui <https://www.idx.co.id> Sedangkan menurut sifat datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka yang menekankan pengukuran hasil yang objektif dengan analisis statistik (Balaka, 2022). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan merekam informasi yang diperlukan menggunakan peralatan elektronik yang tersedia atau dengan mencatat data yang sudah ada dalam bentuk dokumen (Nurhayati, 2019). Teknik analisis dengan menggunakan bantuan data program warfPLS versi 7.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil analisis Deskriptif

Variabel	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Nilai Perusahaan	5,017	0,328	1,299	0,856
Perencanaan Pajak	0,097	-0,011	0,012	0,016
Akuntabilitas Dewan	0,938	0,500	0,786	0,102
Transparansi	1,000	0,786	0,942	0,063

Sumber warfPLS

Tabel 1. hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data (N) yang digunakan untuk masing-masing variabel berjumlah sama yaitu 184 sampel. Nilai minimum menunjukkan data dengan nilai terendah dalam penelitian, sedangkan nilai maksimum menunjukkan data dengan nilai tertinggi. Nilai rata-rata (mean) diperoleh dari total keseluruhan nilai masing-masing variabel yang dibagi dengan jumlah sampel yang dianalisis, sementara itu, standar deviasi menggambarkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata.

Tabel 2. Frekuensi Variabel Dummy Komite CSR

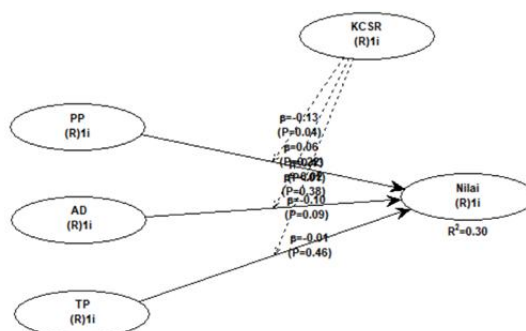
Kategori	Keterangan	Jumlah Data Sampel	Presentase
0	Tidak Memiliki Komite CSR	168	88%
1	Memiliki Komite CSR	22	12%
Total		190	100%

Sumber: data olah warfPLS

Berdasarkan tabel 2. distribusi variabel komite CSR yang diukur menggunakan variabel dummy menunjukkan bahwa dari total 184 data sampel perusahaan sektor industri yang

terdaftar di BEI tahun 2019-2023, terdapat 168 data dengan presentase 88% dari total data berasal dari perusahaan yang tidak memiliki komite CSR. Sedangkan sebanyak 22 data dengan presentase 12% dari total data berasal dari perusahaan yang memiliki komite CSR. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite CSR di perusahaan masih relatif rendah. Hal ini menindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel belum menjadikan komita CSR sebaagai bagian dari struktur tata kelola perusahaan.

Diagram penelitian



Gambar 1. Diagram Penelitian

Berdasarkan gambar 1. diatas, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan dengan pengukuran Tobin's Q, variabel independen yaitu perencanaan pajak, akuntabilitas, dan transparansi, serta variabel moderasi yaitu komite CSR.

Goodnes of Fit

Tabel 3. Goodness of Fit

Model F	Value	Signifikan	Rule of Thumb	Keterangan
<i>Average path coefficient</i> (APC)	0,123	0,022	$P < 0,05$	Memenuhi
<i>Average R-Square</i> (ARS)	0,305	$<0,001$	$P < 0,05$	Memenuhi
<i>Average Adjusted R-Square</i> (AARS)	0,281	$<0,001$	$P < 0,05$	Memenuhi
<i>Average Variance Inflation Factor</i> (AVIF)	1,600		≤ 3.3 if ≤ 5	Memenuhi
<i>Average Full Collinearity VIF</i> (AFVIF)	1,449		≤ 3.3 if ≤ 5	Memenuhi

<i>Tenenheus Gof (Gof)</i>	0,552	<i>Small</i> $\geq 0,1$ <i>Medium</i> $\geq 0,25$ <i>Large</i> $\geq 0,36$	<i>Large</i>
----------------------------	-------	--	--------------

Sumber: data olah warpPLS

Berdasarkan tabel 4.3.3-1 semua uji evaluasi model fit yang digunakan dalam penelitian ini terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini fit. Ukuran model pada penelitian ini antara lain: APC = 0,123, ARS = 0,305, dan AARS = 0,281; semuanya signifikan (APC P = 0,022, ARS P=<0,001, dan AARS P=<0,001). Nilai AVIF = 1,600 dan nilai AFVIF = 1,449 lebih rendah dari batas penerimaan kriteria yaitu $\leq 3,3$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak memiliki masalah kolinieritas vertikal (kolinearitas antara variabel eksogen atau prediktor dan endogen atau kriteria). Nilai Tenenheus Gof (Gof) = 0,552 artinya daya prediksi model penelitian ini termasuk dalam kategori large karena nilainya $\geq 0,36$.

Penjelas Model

Tabel 4. R-Squared Coefficient, Q-Squared Coefficient, dan Effect

<i>R-Squared</i> = 0,305			
<i>Q-Squared</i> = 0,311			
<i>Effect size</i>			
Variabel	Path Coefficients	Keterangan	Rule of Thumb
PP	0,227	Sedang	$>0,02$ Lemah $>0,15$ Sedang $>0,35$ Kuat
AD	0,018	Lemah	
TP	0,000	Lemah	
KCSR*PP	0,053	Lemah	
KCSR*AD	0,007	Lemah	
KCSR*TP	0,002	Lemah	

Sumber: data olah warpPLS

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil R-Squared sebesar 0,305 yang menunjukkan bahwa 30,5% variasi variabel endogen atau dependen (nilai perusahaan) dapat dijelaskan oleh variabel eksogen atau independen (perencanaan pajak, akuntabilitas dewan, dan transparansi); moderasi Komite CSR sedangkan sisanya 69,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil Q-Squared dalam penelitian ini sebesar 0,311 menunjukkan validitas prediktif yang baik karena memiliki nilai diatas 0. Hasil effect size pada penelitian ini menunjukkan nilai effect size perencanaan pajak (PP) sebesar 0,227 atau 22,7% artinya memiliki pengaruh sedang terhadap nilai perusahaan. Sedangkan akuntabilitas dewan (AD) sebesar 0,018 atau 1,8%, dan transparansi (TP) sebesar 0,000 atau 0% artinya memiliki pengaruh sangat kecil terhadap nilai perusahaan. Di sisi lain nilai effect size KCSR*PP sebesar 0,053 atau 5,3%, KCSR*AD sebesar 0,007 atau 0,7%, dan KCSR*TP sebesar 0,002 atau 0,2% berarti nilai kontribusi individu variabel moderasi komite csr terhadap nilai perusahaan termasuk lemah atau memiliki pengaruh kecil dari segi praktis.

Interpretasi Path Coefficient dan P-value

Tabel 5. Path Coefficient dan P Value

Variabel	Nilai Perusahaan		Rule of Thumb	Kesimpulan
	Path Coefficients	P-Value		

PP	0,430	<0,001	$P < 0,05$	Diterima
AD	-0,096	0,092	$P < 0,05$	Ditolak
TP	-0,007	0,462	$P < 0,05$	Ditolak
KCSR*PP	-0,130	0,035	$P < 0,05$	Ditolak
KCSR*AD	0,055	0,224	$P < 0,05$	Ditolak
KCSR*TP	-0,022	0,385	$P < 0,05$	Ditolak

Sumber: data olah warpPLS

Berdasarkan tabel 5. Pada model menunjukkan hasil dari path coefficient dan P-value dari masing-masing variabel yang menunjukkan arah dari hipotesis berdasarkan pengujian yaitu:

1. Pengujian Hipotesis 1 (Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan)
Tabel menunjukkan nilai p-value signifikansi <0,001 sehingga H1 diterima, sedangkan nilai koefisien beta sebesar 0,430. kesimpulannya perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
2. Pengujian Hipotesis 2 (Akuntabilitas Dewan terhadap Nilai Perusahaan)
Tabel menunjukkan hasil p-value signifikansi 0,092 > 0,05 sehingga H2 ditolak, sedangkan nilai koefisien beta sebesar -0,096. kesimpulannya akuntabilitas dewan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3. Pengujian Hipotesis 3 (Transparansi terhadap Nilai Perusahaan)
Tabel menunjukkan nilai p-value signifikansi 0,462 > 0,05 sehingga H3 ditolak, sedangkan koefisien beta sebesar -0,007. Kesimpulannya bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
4. Pengujian Hipotesis 4 (Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Moderasi Komite CSR)
Tabel menunjukkan nilai p-value signifikansi 0,035 < 0,05 sehingga H4 diterima, sedangkan nilai koefisien beta -0,130 artinya komite csr memoderasi (memperlemah) perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Walaupun secara statistik nilai signifikansinya di bawah 0,05 dan nilai path coefficient bertanda negatif menunjukkan bahwa komite CSR tidak berperan secara efektif sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Hal ini, dikarenakan arah yang tidak sesuai karena kegagalan komite CSR dalam memoderasi hubungan ini dimana keberadaan komite CSR justru membatasi dampak positif perencanaan pajak terhadap peningkatan nilai perusahaan karena adanya pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial.
5. Pengujian Hipotesis 5 (Akuntabilitas Dewan terhadap Nilai Perusahaan dengan Moderasi Komite CSR)
Tabel menunjukkan nilai p-value signifikansi 0,224 < 0,05 sehingga H5 ditolak, sedangkan koefisien beta sebesar 0,055. Kesimpulannya bahwa komite csr tidak memoderasi (memperkuat) akuntabilitas dewan terhadap nilai perusahaan.
6. Pengujian Hipotesis 6 (Transparansi terhadap Nilai Perusahaan dengan Moderasi Komite CSR)
Tabel menunjukkan nilai p-value signifikansi 0,385 > 0,05 sehingga H6 ditolak, sedangkan koefisien beta sebesar -0,022. Kesimpulannya bahwa komite csr tidak memoderasi (memperkuat) transparansi terhadap nilai perusahaan.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai path coefficient 0,430 yang menunjukkan nilai positif dan p-value signifikan dengan $P = <0,001$ yang mana nilai tersebut masih berada di dalam kriteria yang ditentukan yaitu $<0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dengan demikian H_1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Dalam konteks ini sejalan dengan teori agensi dimana perencanaan pajak yang efektif dapat mencerminkan peran manajerial yang bertanggung jawab terhadap pemilik perusahaan (principal), karena mampu mengoptimalkan efisiensi keuangan perusahaan dan meningkatkan keuntungan setelah pajak. Perencanaan pajak yang baik dapat memberikan penghematan kas (cash saving) yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk kegiatan operasional, investasi, atau distribusi dividen kepada pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafika Hardianti, (2024), Christiani *et al.*, (2022), dan Pratiwi & Reschiwati, (2022) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hubungan yang positif tersebut mencerminkan bahwa manajer maupun manajemen perusahaan melaksanakan aktivitas perencanaan pajak dengan optimal, sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan yang didapat yang lebih besar dari biaya dan resiko yang ditanggung (Wibisono & Budiarto, 2021). Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian P. A. Sari, (2022) dan Sari & Irawati, (2021) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Akuntabilitas Dewan Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai path coefficients variabel akuntabilitas dewan -0,096 menunjukkan nilai negatif dan p value tidak signifikan dengan $P = 0,092$, dimana hasil tersebut $> 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dewan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan demikian H_2 ditolak. Ketidak signifikan ini mengidentifikasi bahwa mekanisme akuntabilitas yang diterapkan belum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai perusahaan. Meskipun secara teoritis akuntabilitas dianggap dapat mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham, dalam praktiknya tidak semua bentuk akuntabilitas berdampak langsung pada kinerja pasar atau nilai ekonomis perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dewan atau belum optimalnya pelaporan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chen, (2018) yang menunjukkan bahwa aspek tata kelola seperti akuntabilitas tidak selalu berdampak positif terhadap nilai perusahaan. penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran dewan yang tidak optimal atau formalitas dalam implementasi akuntabilitas dapat mengurangi efektivitasnya. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Linuih & Parasetya, (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dewan dapat berpengaruh positif terhadap perusahaan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai path coefficients variabel transparansi -0,007 menunjukkan nilai negatif dan p value tidak signifikan dengan $P = 0,462$,

dimana nilai tersebut $>0,05$ sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan demikian hipotesis H3 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linuih & Parasetya, (2024) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan transparansi dan pengungkapan masih belum cukup guna menaikkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan komponen penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, namun pengaruhnya terhadap nilai perusahaan belum terlihat signifikan dalam sampel yang digunakan penelitian ini. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilani Marpaung & Manalu, (2020) dan Laksmi *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa transparansi dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa nilai path coefficients pengaruh moderasi komite csr dengan perencanaan pajak adalah sebesar p-value signifikan dengan $P = 0,035$ lebih kecil dari $0,05$. hal ini menunjukkan bahwa komite CSR terbukti memoderasi hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis diterima secara statistik. Namun Path coefficient $-0,130$ menunjukkan arah hubungan moderasi ini bersifat negatif. Artinya, meskipun komite CSR signifikan, arah moderasinya melemahkan hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. walaupun secara statistik nilai signifikansinya di bawah $0,05$ dan nilai path coefficient bertanda negatif menunjukkan bahwa komite CSR tidak berperan secara efektif sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa komite CSR memperkuat pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite CSR tidak dapat memoderasi perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini, dikarenakan kegagalan komite CSR dalam memoderasi hubungan ini dapat dijelaskan melalui teori agensi. Dimana dalam praktiknya, keberadaan komite CSR belum berjalan secara efektif dalam mengawasi kebijakan perencanaan pajak perusahaan. perencanaan pajak yang terlalu agresif bisa bertentangan dengan prinsip CSR, sehingga yang awalnya dapat memperkuat komite CSR justru membatasi ruang gerak perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Dengan kata lain, semakin aktif peran komite CSR, maka peningkatan nilai perusahaan menjadi lebih rendah. Dari sudut pandang teori keagenan, keberadaan komite CSR sebagai bagian dari mekanisme tata kelola dapat berfungsi sebagai pengawas perilaku manajemen termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan. Komite CSR dapat berperan dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan dengan mencegah tindakan yang legal, tetapi dinilai tidak etis oleh publik atau investor, seperti penghindaran pajak yang berlebihan. Namun dalam penelitian ini komite CSR justru bernilai negatif dikarenakan ketika perusahaan terlalu agresif dalam melakukan perencanaan pajak demi menekan beban pajak dan meningkatkan laba yang dapat berdampak positif terhadap nilai perusahaan, hal ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang dijunjung oleh komite CSR. Akibatnya, komite CSR cenderung membatasi atau mengontrol strategi perencanaan pajak yang terlalu agresif agar tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik.

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Dewan Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa nilai path coefficients pengaruh moderasi komite CSR dengan akuntabilitas dewan adalah sebesar 0,055 menunjukkan nilai positif dan nilai p-value tidak signifikan dengan $P = 0,224$ dimana nilai tersebut $> 0,05$ sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa komite CSR tidak dapat memoderasi terhadap nilai perusahaan, dengan demikian H_5 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite CSR dalam perusahaan belum mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara tingkat akuntabilitas dewan dengan nilai perusahaan. Artinya, meskipun akuntabilitas tinggi, keberadaan komite CSR tidak memberikan pengaruh tambahan terhadap peningkatan atau penurunan nilai perusahaan.

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis 6 menunjukkan bahwa nilai path coefficients pengaruh moderasi komite CSR dengan transparansi adalah sebesar -0,022 menunjukkan nilai negatif dan nilai p-value tidak signifikan dengan $P = 0,385$ dimana nilai tersebut $> 0,05$ sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa komite CSR tidak dapat memoderasi transparansi terhadap nilai perusahaan, dengan demikian H_6 ditolak. Hasil ini meskipun perusahaan menyampaikan informasi secara transparan dalam laporan tahunan, keberadaan komite CSR tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam memperkuat ataupun memperlemah hubungan tersebut terhadap peningkatan nilai perusahaan. Artinya, keberadaan komite CSR dalam perusahaan belum efektif dalam mengelola dan menyalurkan praktik transparansi menjadi nilai tambah yang dirasakan oleh pemegang saham.

KESIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian variabel perencanaan pajak, akuntabilitas dewan, dan transparansi serta peran komite CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang diuji menggunakan analisis Partial Least Squared (PLS) – Structural Equation Modeling (SEM) sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik aktivitas perencanaan pajak dalam perusahaan maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini karena pihak manajemen melakukan perencanaan pajak sehingga laba yang didapat perusahaan akan maksimal. Dengan demikian tingkat kesejahteraan pemegang sahamnya akan tinggi.
2. Akuntabilitas dewan dan transparansi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dewan belum cukup kuat dalam mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Ketidaksignifikan ini terjadi karena belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Komite CSR tidak dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki komite CSR lebih cenderung berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak agar tidak dianggap melakukan tax avoidance atau mengurangi kontribusi kepada negara. Hal ini bisa menyebabkan perencanaan pajak yang awalnya efektif meningkatkan efisiensi keuangan, justru dibatasi oleh standar etika atau kebijakan sosial yang

diterapkan komite CSR akibatnya, dampak positif terhadap perencanaan pajak menjadi lemah.

4. Komite CSR tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas dewan dan transparansi terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena masih banyak perusahaan yang belum menerapkan atau membentuk komite CSR dalam pelaporannya.

2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti hanya meneliti objek perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya dalam rentang waktu 5 tahun sehingga berpeluang menimbulkan subjektivitas dalam penelitian.
3. Peneliti hanya meneliti 3 (akuntabilitas dewan, transparansi, dan komite CSR) variabel dalam GCG saja.

3. Saran dan Rekomendasi

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jangka waktu periode pengamatan untuk mengetahui adanya komite CSR.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti CSR, atau menambahkan variabel GCG secara keseluruhan seperti kepemilikan manajerial, komite audit dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Balaka, M. Y. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. *Widina Bhakti Persada Bandung*, 1, 130.
- Chen, X. (2018). Corporate Social Responsibility Disclosure, Political Connection and Tax Aggressiveness: Evidence from China's Capital Markets. *Open Journal of Business and Management*, 06(01), 151–164. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2018.61010>
- Christiani, Y. N., Rane, M. K. D., & Sine, D. A. (2022). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Among Makarti*, 14(2), 77–88. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.211>
- Diana, P., & FX. Pudjo, W. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021. *Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 1–11.
- Astuti, puji T., & Herawati, N. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap nilai Perusahaan: Dampak Moderasi Dewan Komisaris. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 235–246.
- Farah Latifah Nurfauziah, C. K. U. C. (2021). Pengaruh Pengungkapan Csr Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Industri Subsektor Tekstil Dan Garmen. *Badruzaman Jajang*, 12(1), 29–57.
- Khan, A., Afeef, M., Ilyas, M., & Jan, S. (2024). Does CSR committee drive the association between corporate social responsibility and firm performance? International evidence. *Managerial Finance*, 50(1), 50–74. <https://doi.org/10.1108/MF-10-2022-0508>
- Kuzey, C., Uyar, A., Nizaeva, M., & Karaman, A. S. (2021). CSR performance and firm performance in the tourism, healthcare, and financial sectors: Do metrics and CSR committees matter? *Journal of Cleaner Production*, 319(October 2020), 128802. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128802>

- Laksmi, K. W., Oka Ariwangsa, G. N., & Niron, V. C. (2024). Profitabilitas dan transparansi dalam meningkatkan nilai Perusahaan. *Journal of Economics and Banking*, 6(1), 118–125.
- Linuih, D. R., & Parasetya, M. T. (2024). pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Meilani Marpaung, C., & Manalu, M. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Dan Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Otomotif Yang Listing Di Bei. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 43–53. <https://doi.org/10.58303/jtimb.v3i2.2445>
- Melasari, R., Rosliana, R., & Silvionita, P. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Opd Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 106–118. <https://doi.org/10.32520/jak.v11i2.2263>
- Menge, M. S. C., & Nuringsih, K. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(2), 398. <https://doi.org/10.24912/jmk.v3i2.11886>
- Michael C. Jensen, W. H. M. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure Michael. *Financial Economics*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Nelzi, Fati, N. (2022). Buku Ajar Metodologi Penelitian. *UKI Press*, 1–90.
- Nuansari, S. D., & Ratri, I. N. (2022). Pemetaan riset teori agensi: Bibliometrik analisis berbasis data Scopus. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.105>
- Nurhayati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Praktis*. 2019. Unikal Perss
- Pratiwi, N. A., & Reschiwati. (2022). Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, dan Covid-19 Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 1–14. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.491>
- Puspita, M. D., Mulyadi, & Sianipar, P. B. H. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 310–322. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1439>
- Rafika Hardianti, Y. S. K. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 7(8), 1–22.
- Sari, D., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak , Struktur Modal Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Moderasi. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 6(1), 1–12.
- Sari, P. A. (2022). *Pengaruh Tax Planning, Pengungkapan Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan*. 25(April 2022), 3012–3049.
- Setkab Agung. (2024). *Lampaui Rp565 Triliun, Tren Investasi Manufaktur Terus Naik di Dekade Terakhir*. Media Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/lampaui-rp565-triliun-tren-investasi-manufaktur-terus-naik-di-dekade-terakhir/>
- Wibisono, B. T., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.32400/jiam.5.1.2021.34693>